



PELOPOR PENDIDIKAN

Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Pembelajarannya

Membicarakan Konsep Ejaan Bahasa Madura di Tengah Tantangan ICT
Muhammad Saidi

Peningkatan Motivasi untuk Berprestasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas III SMA Negeri I Pangsid
Nurdin

Mendesain Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Berbasis Lingkungan
Musaheeri

Penerapan *Role Playing* yang Berorientasikan pada Pendekatan Perkembangan Psikis untuk Mengoptimalkan Sikap Santun Siswa SMP 1 Klakah
Muji Harjono

Sekolah Menengah Kejuruan di Era Desentralisasi
Asmoni

Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi Melalui Penerapan Strategi Belajar Mengulang Pada Siswa Kelas I SMPN 1 Palangga
Amir M. Ishaq

Penerapan Pembelajaran Proyek-Investigasi pada Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas VII SMP
Warli

Penggunaan Panas Matahari sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Hj. Titik Rumini

Diterbitkan Oleh :
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) PGRI Sumenep

DAFTAR ISI

Halaman

Membicarakan Konsep Ejaan Bahasa Madura di Tengah Tantangan ICT <i>Muhammad Saidi</i>	1 – 5
Peningkatan Motivasi untuk Berprestasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas III SMA Negeri I Pangsid <i>Nurdin</i>	6 – 10
Mendesain Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Berbasis Lingkungan <i>Musaheri</i>	11 – 14
Penerapan <i>Role Playing</i> yang Berorientasikan pada Pendekatan Perkembangan Psikis untuk Mengoptimalkan Sikap Santun Siswa SMP 1 Klakah <i>Muji Harjono</i>	15 – 20
Sekolah Menengah Kejuruan di Era Desentralisasi <i>Asmoni</i>	21 – 28
Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi Melalui Penerapan Strategi Belajar Mengulang Pada Siswa Kelas I SMPN 1 Palangga <i>Amir M. Ishaq</i>	29 – 34
Penerapan Pembelajaran Proyek-Investigasi pada Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Bangun Datar Kelas VII SMP <i>Warli</i>	35 – 42
Penggunaan Panas Matahari sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran <i>Hj. Titik Rumini</i>	43 – 52

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI ERA DESENTRALISASI

Asmoni⁵⁾

Abstrak : SMK sebagai lembaga pelayanan jasa dibidang pendidikan dan pelatihan perlu memperhatikan standar pelayanan yang harus diberikan kepada peserta diklat atau stakeholder lainnya yang telah diatur dalam Kepmendiknas No. 053/U/2001 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, khusus untuk SMK. Sebagai satuan pendidikan, pendidikan kejuruan mengalami perubahan besar dalam era otonomi pendidikan ini. Perubahan-perubahan ini searah dengan ikhtiar perkembangan konsep yang dilakukan dalam rangka mengatasi problematika yang dihadapi oleh dunia pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan menengah dan kejuruan.

Kata Kunci : SMK, dan desentralisasi

PENDAHULUAN

Kehendak untuk melakukan reformasi dalam kehidupan politik nasional tampaknya merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan yang diinginkan masyarakat. Salah satu agenda reformasi nasional yang dilaksanakan pemerintah adalah yang menyangkut masalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Untuk mengimplementasikan kebutuhan tersebut telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu : 1). Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 2). Undang Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, 3). Peraturan Pemerintah no. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan telah lahir : (1). Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan (2). Peraturan Pemerintah nomor 61 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Di sektor pendidikan, tuntutan reformasi juga bergulir seiring gan arus reformasi di sektor-sektor lainnya. Salah satunya adalah tentang Desentralisasi Pendidikan. Desentralisasi adalah praktik yang telah mendunia yang merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tetap eksis dalam persaingan global. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen dapat dipecahkan.

Dengan mencermati beberapa hal di atas, maka pendidikan dalam otonomi daerah ini membutuhkan langkah-langkah dan paradigma termasuk pada aspek perencanaan dan manajemennya. Oleh karena itu perencanaan yang bersifat "top down" beralih ke perencanaan "bottom up" dari perencanaan sentralistik beralih ke desentralistik, dari perencanaan tradisional ke perencanaan partisipatori.

Melihat beban dan kompleksitas masalah yang sudah dan akan terjadi pada aspek pendidikan di tingkat kabupaten, maka perencanaan dan pengelolaan merupakan hal yang harus dilakukan dengan baik karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan pendidikan tidak selalu konstan, maka untuk itu para pendidik dan administrator berusaha, menghadapi tantangan dan perubahan ini dalam rangka upaya mempertahankan dan memajukan lembaganya masing-masing, untuk itu dengan pandangan bahwa

⁵⁾ Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumenep. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris STKIP PGRI Sumenep

perencanaan pendidikan adalah salah satu sarana untuk menghadapi tantangan dan perubahan ini. Para pendidik dan administrator menurut Pidarta (1990) tidak mereaksi terhadap perubahan ini melainkan mengantisipasi melalui perencanaan.

PEMBAHASAN

Gambaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan masalah besar, dan pelaksanaannya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ideal belum dirumuskan secara tepat (Sukiadi, 2001) dan menurut Sunarto (2001) otonomi daerah harus difahami secara filosofi dan implementasinya agar tetap berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena bisa muncul persepsi yang beragam tentang hakekat otonomi itu sendiri dan terlupakan beberapa hal seperti : semangat kedaerahan mengalahkan semangat nasionalisme Indonesia, dan kepentingan bersama antar daerah terabaikan.

Otonomi daerah adalah salah satu upaya pemberdayaan, artinya daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengolahan, pemanfaatan atau potensi berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya sendiri, termasuk sumber dalam bidang pendidikan.

Tujuan utama desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten adalah untuk : memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang sudah atau lapangan kerja akan diadakan di kabupaten itu memenuhi kepentingan masyarakat atau orang tua akan kebutuhan/pengembangan bakat dan minat putra-putri mereka; membantu mengembangkan wilayah kabupaten terutama dalam bidang bisnis; menjaga kelestarian lingkungan alam pencemaran atau polusi yang kini semakin meningkat; menyesuaikan pendidikan dengan ciri geografis kabupaten itu; menyesuaikan pendidikan dengan ciri kebudayaan, adat istiadat dan norma-norma masyarakat setempat. Hal ini jelas merupakan aspek nilai lebih daripada otonomi daerah (Pidarta, 2001)

Namun demikian tantangan yang dihadapi adalah menyangkut kemampuan daerah dalam bidang sumber daya manusia dan modal awal pembangunan daerah. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan (capital) serta teknologi, perencanaan dan manajemen memerlukan kesiapan yang serius. Berbagai aspek yang telah disebutkan diatas, maka daerah ditantang untuk proaktif mengatasinya.

Ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni (1) Prinsip Subsidiarity, yaitu mendelegasikan proses pembuatan keputusan kepada tingkat yang paling dekat dan relevan dengan persoalan. Tingkat diatasnya menjalankan fungsi, yang tidak dekat dilakukan oleh tingkat bawah. (2) Prinsip good Governmence, proses pengolahan pemerintahan yang baik dan bebas KKN. (3). Prinsip pemerintah sebagai fasilitator, yakni pemerintah menetapkan haluan dan menyediakan fasilitas sehingga masyarakat dapat menyelenggarakan urusannya secara otonom (Koeswara, 2000).

Berdasarkan prinsip tersebut diatas sebenarnya dalam bidang pendidikan bisa diterapkan "*school based quality improvement*" yakni peningkatah sekolah berdasarkan kondisi sekolah atau yang lebih dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (Fikri, 2001). Dengan konsep tersebut di atas maka perubahan pola perencanaan dan manajemen pendidikan dalam otonomi daerah akan berubah sesuai paradigma baru sebagaimana berikut :

Pola lama	menuju	Pola Baru
Sub ordinasi	→	Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat	→	Pengambilan keputusan partisipasi
Ruang gerak kaku	→	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratif	→	Pendekatan profesional
Sentralistik	→	Desentralistik
Diatur	→	Motivasi sendiri
Over-regulasi	→	Deregulasi
Mengontrol	→	Mempengaruhi
Mengarahkan	→	Memfasilitasi
Menghindari resiko	→	Mengelolah resiko
Gunakan uang semuanya	→	Gunakan uang seefisien
Individual yang cerdas	→	Teamwork yang cerdas
Informasi terribadi	→	Informasi terbagi
Pendelegasian	→	Pemberdayaan
Organisasi hirarkis	→	Organisasi datar

(Sumber, MPMBS DEPDIKNAS)

Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan

Karena konsep perubahan sentralisasi ke desentralisasi menjadi perbincangan yang menarik dan lebih bisa menjamin untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Maka dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Kelebihan Desentralisasi Pendidikan

Ada beberapa hal kelebihan atau kebaikan dalam sistem desentralisasi pendidikan adalah

1. Pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
2. Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik.
3. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh Sekolahnya. Ia bertanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat setempat. Semua kegiatan sekolah yang dijalankannya mendapat pengawasan dan social control yang langsung dari pemerintah dan masyarakat setempat.
4. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat. (Ngalim Purwanto, 1995)

Menurut S.H Sarundajang keunggulan desentralisasi sebagaimana berikut ini :

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintahan pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (*diferensial*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan/keperluan daerah.
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dilaksanakan dan diterapkan di seluruh wilayah negara. Hal-hal yang ternyata kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenangan-kesewenangan dari pemerintah pusat.
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah.
8. Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Kelemahan Desentralisasi Pendidikan

Adapun kelemahan atau keburukan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut

1. Karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan di seluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan perpecahan bangsa
2. Hasil pendidikan dan pengajaran, tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik mutu, sifat, maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya di kemudian hari dalam masyarakat yang lebih luas.
3. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan lainnya cenderung untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas dan kewajiban guru pada umumnya lain, daripada karyawan-karyawan yang bukan guru.
4. Penyeleggaran dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah atau wilayah itu mungkin sangat memberatkan beban masyarakat setempat. (Ngalim Purwanto, 1995).

Sedangkan menurut pendapat Josef Riwo Kaho (1970) kelemahan desentralisasi adalah:

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya-apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman, uniformitas dan kesederhanaan. (S.H. Sarundajang, 2001)

Dengan pemberian wewenang yang begitu luas kepada daerah termasuk didalamnya perihal pendidikan (tidak termasuk pendidikan menengah kejuruan), maka sejumlah keraguan muncul kepermukaan tentang implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan pertama, apakah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewenangan pendidikan sebagaimana

dikemukakan diatas? Keraguan itu muncul mengingat Pemda Kabupaten/Kota (Dinas P & K) hanya memiliki pengalaman mengelola SD. Ditinjau dari potensi sumberdaya manusia, kapasitas ini Jawa Timur misalnya tidak merata diantara kabupaten/kota. Sebagian besar setengah mampu, sebagian kecil kurang mampu, dan belum ada atau sedikit yang sudah mampu (Surbakti, 2000). Untuk mengatasi kendala ini dan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal di kabupaten, Menurut Pidarta (2001) dibutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan kerjasama itu bisa diwujudkan dalam satu wadah, misalnya dengan "Badan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat di singkat (BKSM).

Dengan diikutsertakannya sekolah dan masyarakat (*stake holder*) maka pikiran-pikiran yang menyangkut kebijakan dan substansi pendidikan dapat diakomodir, selain itu keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sangat membantu ditemukannya data-data primer yang akurat, asumsi-asumsi, harapan sekaligus kemungkinan-kemungkinan problematika beserta kendalanya (Kristina, 1993).

Sejalan dengan ide modal Badan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat (BKSM) yang telah digagas oleh Made Pidarta tersebut diatas, Ramlan Surbakti (2000) mengusulkan agar Pemda Dan DPRD perlu membentuk "Komisi Pendidikan Daerah". Ide yang sama juga disampaikan oleh Aminulloh (Jawa Pos 13 Maret 2001) bahwa pemerintah daerah harus membentuk pengelola pendidikan tingkat daerah (*board of education*) yang mengembang tugas perencanaan dan pengembangan (R&D).

Apa yang di gagas oleh pakar otonomi dan pemerhati pendidikan diatas maka dengan terbentuknya badan/komisi/dewan atau apalah namanya, maka kendala-kendala seperti telah dikemukakan diatas akan dapat teratasi. Sebab dengan tugas membahas dan merumuskan kebijakan pendidikan daerah, maka prinsip dasar otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam mengelola daerahnya dapat teratasi.

Kedua, apakah Kabupaten/Kota memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, apakah memiliki dana yang memadai, dan apakah memiliki kehendak politik kuat (*political will*) untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membiayai pendidikan, seperti menyediakan tanah dan membangun sekolah, kesejahteraan guru, pengadaan buku dan alat-alat bantu pelajaran. Sebagian daerah memiliki dana dan komitmen yang tinggi tetapi sebagian lagi mungkin memiliki komitmen yang tinggi tetapi tidak memiliki dana yang memadai untuk membangun gedung sekolah, gaji guru ataupun biaya pendidikan lainnya.

Dalam percaturan Otda, sumber dana merupakan topik permasalahan yang paling banyak didiskusikan dalam seminar, media elektronik, maupun media cetak. Sentral permasalahannya adalah bagaimana menggali dana sebanyak-banyaknya atau meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya rencana berbagai model penguatan atau penarikan pajak bermunculan dan rakyat menjadi sasarannya.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas memerlukan biaya yang besar, sementara itu masyarakat amat terbatas kemampuan untuk membiayai pendidikan. Apabila masyarakat (baca rakyat-orang tua) menghendaki pendidikan yang murah, maka berarti biaya pendidikan itu harus dipakai oleh pemerintah (daerah). Djojonegoro (Jawa Pos, 19 Maret 2001) menginformasikan bahwa biaya pendidikan yang disediakan pemerintah pusat pada tahun 2000 sebesar 25 triliun rupiah, sedang pada tahun 2001 hanya Rp. 11 triliun. Ini berarti harus tersedia biaya tambahan sebanyak Rp. 14 triliun dari daerah terpaksa menanggungnya secara bersama-sama.

Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah menengah kejuruan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan harus mampu melihat paradigma baru dalam pendidikan yang menuntut proses terobosan

pemikiran agar output yang bermutu dihasilkan sesuai dengan dunia kerja. Sebagaimana menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 : Sekolah menengah kejuruan (SMK) menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam hal penguasaan teknologi kejuruan; peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inovatif, kewirausahaan, apresiasi dan kemampuan di bidang seni dan olah raga, aktualisasi nilai dan penerapan prinsip saling menghargai, kejujuran dan pluralisme, partisipasi sosial, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam (Depdiknas, 2002).

Mendiknas (1998) menyatakan bahwa "*Vocational Secondary Education gives priority to expanding specific occupation skills and emphasizes the preparation of students to enter the world of work and expanding their attitude*". Sekolah menengah kejuruan memberikan prioritas pada pengembangan spesifikasi keahlian kerja dan berdampak pada persiapan untuk memasuki dunia kerja dan sikap profesionalisme siswa. Sejalan dengan Pidarta, (1997) bahwa sekolah menengah kejuruan bertujuan menyiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu sebagai bekal terjun ke masyarakat menjadi tenaga kerja menengah.

SMK adalah pendidikan menengah kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu (PP No. 29 tahun 1990). Sedangkan secara detail melalui Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 dan Kepmendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, antara lain menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan adalah satuan pendidikan kejuruan yang bertujuan antara lain :

1. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau meluaskan pendidikan dasar.
2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar.
3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan visi sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan teknologi dan kesenian.
4. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional (Depdiknas, 2002).

Standar Kompetensi Sebagai Instrumen Pengembangan Sumber Daya Manusia

Para konsumen/pelanggan semakin selektif sementara ukuran mutu terus berkembang, bahkan seolah-olah semakin sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan antara lain semakin banyaknya temuan ilmu dan teknologi baru sebagai manifestasi tuntutan kemajuan peradaban manusia. Industri yang menggunakan tenaga ahli sebagai modal utama, disamping aspek manajerial dan teknologi, tentu harus terus mengikuti perkembangan yang berhubungan dengan jaminan mutu, baik mutu pelayanan maupun profesionalisme, karena produk dan jasa yang bermutu hanya dihasilkan oleh orang yang bermutu. Ada beberapa alasan mengapa standar kompetensi dipilih sebagai acuan untuk pengembangan sumber daya manusia :

1. Kecepatan perubahan dan kemajuan teknologi yang diaplikasikan di industri menurut adanya SDM yang memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibel menghadapinya.
2. Tingginya persaingan global menuntut perusahaan atau industri melakukan perencanaan strategis yang berdampak pada tuntutan dan penyesuaian organisasi yang fleksibel, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada jabatan-jabatan yang mengisinya.

3. Adanya tuntutan untuk organisasi yang cenderung berubah, pengembangan SDM yang mengacu pada standar jabatan yang tetap/baku akan cepat tertinggal, maka dicari model-model pendekatan lain yang lebih efisien.
4. Telah diperkenalkannya dan dipakainya standar *International Labour Organization* (ILO) di beberapa negara Asia Pasifik yang telah diratifikasi secara internasional.
5. Adanya keinginan stake holder yang berasal dari pemerintah atau swasta untuk memiliki wadah yang merumuskan arah kebijakan nasional dalam pengembangan SDM (Depdiknas, 2002).

PENUTUP

Kompetensi tamatan SMK akan tergambar dalam bentuk unjuk kerja sebagai aktivitas nyata, maupun aktivitas tersembunyi meliputi sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti luhur.
2. Pengembangan penguasaan pengetahuan, yang dicirikan dengan proses mencari tahu untuk mampu menginterpretasikan informasi (*process of knowing, know how, and know-why*).
3. Pengembangan keterampilan (*tool skill development*) yang dicirikan dengan ketepatan pada proses tepat waktu, tahan bosan, akurasi dan teliti.
4. Pengembangan pengetahuan nalar (*thinking process/cognitive skill*) dicirikan dengan penciptaan ide baru memandang masalah dengan cara baru, dan merencanakan penanggulangan masalah secara sistematis (Depdiknas, 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, Yusron, 2001, *Memperkuat Kontrol Rakyat di Era Otonomi Daerah*, Jawa Pos, 13 Maret 2001
- Badib, A.A., 1997, *Strategic Planning as Conceived By Henry Mintberg and Jhon M. Bryson*, Makalah Lokakarya dan Workshop tentang Renstra Pengembangan Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral, Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah VII dan IKIP Surabaya
- Boseman, G., and Phatak, A., 1989, *Strategic Management : Test and Cases*, Second Edition, Jhon Wiley & Sons, New York
- Bryson, J. M., 1988, *Strategic Planning for Public and Non Profit Organization*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
- Depdiknas, tt, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*
- Depdiknas, 2002. *Dasar-dasar Pengujian Berbasis Kompetensi*. Jakarta. Dirjen Dikdasmen
- Djojonegoro, Wardiman, 2001, *Pedoman Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Jawa Pos. 19 Maret 2001
- Fikri, Ali, 2001, *Peran Strategis Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Otonomi Pendidikan dalam rangka Dies Natalis STKIP PGRI Jombang*, Tanggal 22 April 2001
- Gaffar, Affan, *Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Masa Depan*, Makalah Pada Seminar Nasional Otonomi Pendidikan dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Baru, tanggal 24 Januari 2000 di Universitas Negeri Surabaya
- Indanoe, S. dkk., 1995, *Perencanaan Strategis Untuk Perguruan Tinggi*, Unit Pengembangan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka cipta. Jakarta
- Sunarto, 2001, *Penyelenggaraan Pendidikan Yang Berkualitas Di Era Otonomi Daerah : Tinjauan Aspek Kurikulum dan Ketenagaan*, Makalah Pada Seminar Otonomi Pendidikan, Dalam Rangka Dies Natalis STKIP PGRI Jombang, tanggal 22 April 2001
- Surbakti, Ramlan, 2000, *Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pengadaan Buku Pelajaran Oleh Penerbit*, Makalah Undang Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Undang Undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.